

EFEKTIVITAS ANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Abdika Jaya

Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas Lubuklinggau

Email: abdika.jaya@akuntanindonesia.or.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses penyusunan anggaran dengan mekanisme partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa, proses pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur desa berdasarkan pedoman perencanaan pembangunan dan efektivitas anggaran partisipatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan kuesioner, wawancara dan teknik dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Sampel diambil dengan menggunakan teknik cluster sampling (sampling area), simple random sampling dan teknik purposive sampling. Informan didefinisikan dengan teknik snowball sampling. Data tersebut kemudian dianalisis dengan scoring dan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Musi Rawas telah cukup berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran pembangunan, proses penyusunan anggaran pembangunan telah sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan dan anggaran partisipatif cukup efektif. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas harus terus menerus dan secara bersamaan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran pembangunan, menyediakan lebih banyak kegiatan lokakarya, pengawasan dan pendidikan pelatihan untuk aparat pemerintah desa tentang anggaran partisipatif dalam perencanaan pembangunan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa.

Kata kunci: efektivitas, partisipatif, anggaran, pembangunan, pedesaan, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dewanto (2004) menyatakan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara biasanya berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Negara yang infrastrukturnya baik biasanya makin makmur. Presiden Republik Indonesia dalam pidato Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 dihadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di gedung DPR RI di Jakarta bahwa pembangunan infrastruktur nasional masih jauh dari sempurna, hal tersebut sering menjadi penghambat berbagai peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial di Indonesia (Liputan 6, 2014). Artinya pembangunan infrastruktur di Indonesia masih memerlukan perbaikan dalam beberapa aspek seperti jumlah anggaran, sumber daya manusia pelaksana pembangunan maupun dari sisi perencanaannya.

Meskipun pemerintah berusaha meningkatkan belanja infrastruktur sejak tujuh tahun terakhir, namun hal tersebut dinilai belum efektif dalam mendorong perekonomian Indonesia (Merdeka, 2012). Selama tujuh tahun terakhir, pemerintah telah menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi 5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dari data yang dikumpulkan, meskipun belanja infrastruktur sudah digenjot tetapi dampak pembangunan terhadap perkembangan ekonomi sangat rendah. Sebagai perbandingan, di China setiap

ada jalan raya atau jembatan dibangun, akan mendorong 0,33 persen pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar proyek itu, sedangkan di Indonesia baru 0,17 persen (Merdeka, 2012).

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pembangunan infrastruktur di Indonesia kurang begitu efektif dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat? Salah satu faktor penyebab ketidakefektifan pembangunan infrastruktur adalah pemerataan anggaran. Hal ini dapat dimaklumi mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Negara. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga sudah berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, baik anggaran yang digulirkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun yang langsung diterima oleh pemerintahan desa seperti Alokasi Dana Desa (Kementerian Keuangan, 2014). Namun pada kenyataannya tetap saja masih menimbulkan permasalahan ketidakefektifan pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan.

Dari berbagai penelusuran informasi ditemukan bahwa perencanaan pembangunan yang tidak melihat kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat sebagai penyebab ketidak efektifan pembangunan infrastruktur di pedesaan dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Salah satu contoh kasus adalah yang terjadi di Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara. Menurut Metrosiantar (2014) ditemukan banyak pembangunan infrastruktur tidak tepat

sasaran dan terkesan mubazir. Disebutkan juga bahwa Pemkab Madina harus benar-benar membuat studi kelayakan atau skala prioritas dalam melaksanakan program pembangunan agar program tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kasus ini mengindikasikan bahwa perencanaan kurang memperhatikan skala prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Beberapa daerah di Indonesia sebenarnya sudah berupaya mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar hasil pembangunan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satu cara yang didevopsionkan adalah menghidupkan kembali budaya-budaya atau kebiasaan lama masyarakat desa yang hampir atau sudah punah. Sebagai contoh di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah juga dilakukan melalui forum adat, yaitu Tudang Sipulung. Di Kota Tasikmalaya dan Kota Surakarta, upaya peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme perencanaan sehingga dinas, badan, lembaga dan kantor pemerintahan kabupaten bisa lebih menangkap aspirasi masyarakat (Theresia, 2014:77).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 2 Ayat (4) yang menyatakan bahwa tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional salah satunya adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Cara yang diwajibkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat ini adalah dengan menerapkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada setiap tingkatan wilayah, mulai dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan undang-undang ini tentu saja setiap daerah di Indonesia wajib menyelenggarakan Musrenbang dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Namun musrenbang yang dilaksanakan pada semua tingkatan pada kenyataannya sebagian besar hanya merupakan kegiatan formalitas saja. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Marbyanto (2008) bahwa pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim.

Berdasarkan konsep, asumsi dan fenomena seperti dijelaskan di atas, perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang efektivitas anggaran partisipatif dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang ada dilapangan yang berhubungan dengan efektivitas anggaran partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas adalah:

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran dengan mekanisme partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas
2. Apakah proses pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur desa telah sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas
3. Sejauh mana efektivitas anggaran partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mempelajari proses penyusunan anggaran dengan mekanisme partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas
2. Mengetahui apakah proses pelaksanaan penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur desa telah sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas
3. Mengetahui sejauh mana efektivitas anggaran partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas

TELAAH LITERATUR

Efektivitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan atau direncanakan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Komaruddin (1994) yang menjelaskan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Komaruddin, 1994).

Anggaran

Manajemen dalam pengelolaan perusahaan terlebih dahulu menetapkan tujuan dan sasaran, kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana yang disusun secara kuantitatif umumnya dituangkan dalam bentuk anggaran. Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat penting untuk mengkomunikasikan rencana-rencana manajemen di dalam suatu organisasi, mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan aktivitas.

Menurut Hansen dan Mowen (2004:354) anggaran adalah:

“Suatu rencana kuantitatif dalam bentuk moneter maupun non moneter yang digunakan untuk menerjemahkan tujuan dan strategi perusahaan dalam satuan operasional”.

Sedangkan menurut Anthony dan Govindarajan (2005:90) anggaran yaitu:

“Sebagai sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi”.

Dari definisi diatas dapat dijelaskan lebih lanjut, bahwa anggaran merupakan perencanaan aktivitas jangka pendek secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter dan satuan ukuran lainnya untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi sebagai alat manajemen untuk perencanaan, pengendalian serta penilaian kinerja manajemen dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Partisipasi

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46). Menurut Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan partisipasi dalam evaluasi.

Anggaran Partisipatif

Partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah mengizinkan manajer lebih bawah mempertimbangkan bagaimana anggaran dibentuk. Adanya partisipasi, pengaruh dan kontribusi dari manajer lebih bawah dalam proses penyusunan anggaran dapat menimbulkan rasa tanggung jawab untuk memenuhi target atau sasaran yang telah ditentukan (Zimmerman 1995). Munculnya rasa tanggung jawab pada manajer lebih rendah dapat memperkuat kreativitas (Hansen dan Mowen 2004).

Para pendukung model anggaran partisipatif mengklaim bahwa anggaran partisipatif dapat meningkatkan tanggung jawab dan mengatasi tantangan yang inheren serta merupakan penyediaan insentif non moneter (Hansen dan Mowen 2004). Mereka berargumen bahwa individu yang terlibat dalam penyusunan anggaran milik mereka akan bekerja keras untuk mencapainya. Selain itu, bagi perusahaan, perilaku anggaran partisipatif memiliki keunggulan dengan masuknya pengetahuan lebih dari kondisi lokal dari suatu proses perencanaan ((Zimmerman 1995).

Proses penyusunan anggaran dimungkinkan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan sasaran anggaran yang harus dicapai. Sejumlah bukti empiris yang ditemukan Alim (2008) menunjukkan bahwa adanya partisipasi yang tinggi pada saat penyusunan anggaran dapat menjadikan senjangan anggaran rendah. Senjangan anggaran menggambarkan tingkat pencapaian sasaran anggaran. Meskipun ada indikasi bahwa partisipasi tinggi mendorong para manajer menyusun sasaran anggaran yang bersifat under value untuk target pendapatan dan over value untuk biaya sehingga menimbulkan senjangan (slack).

Efektivitas Anggaran Partisipatif

Untuk mengetahui efektifitas sebuah perencanaan, khususnya perencanaan pembangunan di Indonesia, pada dasarnya dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada pasal 2 ayat (4) yang juga termaktub dalam Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar

- waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas dijelaskan bahwa substansi perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas memuat beberapa unsur pokok yang meliputi:

1. Kondisi umum daerah.
2. Visi dan misi pembangunan.
3. Prioritas.
4. Strategi pembangunan.
5. Kebijakan.
6. Sasaran dan target (2014:12-20).

Selain perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD melalui mekanisme Musrenbang, masih terdapat perencanaan pembangunan yang dibiayai oleh non APBD, seperti perusahaan swasta atau BUMN melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Mekanisme perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dari masyarakat tingkat bawah (desa/kelurahan) ini dilakukan dengan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD sehingga tidak terjadi *overlapping* atau pembiayaan ganda terhadap suatu proyek pembangunan di daerah (Rusmadi, 2006-a).

Partisipasi masyarakat menurut Theresia dkk (2014:196) adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Seperti telah disebutkan bahwa salah satu tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Tujuan ini didasarkan pada pemikiran bahwa perencanaan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Tanpa pemanfaatan partisipasi masyarakat secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan dapat disesuaikan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Disamping itu, tanpa partisipasi masyarakat sulit pula diharapkan masyarakat akan mematuhi dan menjaga pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Bahkan tidak jarang pula terjadi, masyarakat tidak memanfaatkan sepenuhnya apa yang akan dibangun oleh pemerintah. Karena itu, sangat tepat kiranya bilamana pendekatan Anggaran Partisipatif

(*Participatory Budget*) merupakan alat yang tepat untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan (Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas, 2014:10).

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi individu atau keterlibatan individu dalam kegiatan bersama-sama yang dapat diukur dengan skala yang dikemukakan oleh Slamet (1993:84), mengukur tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan lima variabel yaitu:

1. Jumlah asosiasi yang dimasuki.
2. Frekuensi kehadiran.
3. Jumlah asosiasi dimana dia memangku jabatan.
4. Lamanya menjadi anggota.
5. Tipe asosiasi yang dimasuki.

Skala yang dikemukakan Slamet tersebut hampir sama dengan dengan skala tingkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dikemukakan oleh Theresia dkk (2014:201), yaitu:

1. Memberikan informasi.
2. Konsultasi.
3. Pengambilan keputusan bersama.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan dan 186 desa, dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2016.

Bahan dan Alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa blangko kuisioner serta alat-alat tulis, alat cetak dan alat penghitung data.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Dikatakan penelitian deskriptif karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui/menggambarkan dan menjelaskan secara obyektif fenomena yang muncul (Moleong, 2002:33). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian memiliki makna memahami peristiwa dalam kaitannya dengan orang dalam situasi tertentu. Sehubungan dengan pendekatan kualitatif, Moleong (2002) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang apa yang ada dilapangan secara alamiah dan mendalam. Data penelitian yang berupa kata-kata, respon subjek, dokumen dan hasil pengamatan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Definisi Operasional

1. Anggaran Partisipatif dalam penelitian ini mengacu pada peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas. Partisipasi masyarakat tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan partisipasi yaitu partisipasi masyarakat sebagai (a) pemberi informasi, (b) tempat konsultasi dan (c) pihak yang ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan dalam penelitian ini mengacu pada penyusunan seperangkat perencanaan yang disesuaikan dengan Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Dalam pedoman tersebut disyaratkan beberapa komponen yang harus dimuat dalam menyusun perencanaan pembangunan yaitu (a) kondisi umum daerah; (b) visi dan misi pembangunan; (c) prioritas; (d) strategi pembangunan; (e) kebijakan dan (f) program dan kegiatan.
3. Efektivitas anggaran partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa mengacu pada ketercapaian tujuan dan sasaran pokok perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan

dalam Pedoman Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas yaitu: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara desa dan daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan (e) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Pembangunan infrastruktur desa dalam penelitian ini mengacu pada pengembangan, pengadaan dan dimungkinkan juga perawatan yang dana atau anggarannya langsung diterima oleh desa, baik yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Jadi kegiatan pembangunan yang anggarannya tidak langsung dikelola oleh desa tidak termasuk dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Tabel 1
Jenis dan sumber data

Rumusan Masalah	Jenis Data	Sumber Data	Pengukuran
1. Tingkat partisipasi masyarakat	Primer	Responden/ sampel	Skala likert
2. Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan	Primer	Responden/ sampel	Skala likert
3. Efektivitas Anggaran partisipatif dalam pembangunan	Primer	Responden/ sampel	Skala likert

Sumber: Data diolah

Metode Pengumpulan Data

Kuesioner

Menurut Arikunto (2004), kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang terdiri atas beberapa item yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian. Skala sikap/jawaban responden diukur dengan menggunakan skala Likert dimana setiap item pertanyaan diberikan 5 alternatif jawaban berupa pernyataan "Sangat Setuju", "Setuju", "Netral", "Kurang Setuju" dan "Tidak Setuju".

Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan informasi secara langsung dengan cara tatap muka kepada informan yang telah ditentukan. Sebelum wawancara dilakukan, penulis telah menyiapkan *guidelines* (pedoman) pertanyaan yang akan diajukan, pertanyaan disusun secara terbuka, tidak

kaku atau fleksibel jika ditemui perkembangan masalah yang akan ditanyakan (Arikunto, 2014).

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu menelaah berbagai dokumen-dokumen resmi yang dimiliki seperti, arsip-arsip, buku, gambar atau foto dan *literature* lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Sampel Penelitian

Mengingat luasnya wilayah, keterbatasan waktu dan anggaran, sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *cluster sampling* (*Sampling Area*). Menurut Margono (2004: 127), teknik ini digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau *cluster*. Dari teknik ini didapat 81 orang sebagai sampel penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis Data Hasil Kuesioner

Jawaban responden atas kuesioner yang diberikan untuk memberikan gambaran atas jawaban dari semua rumusan masalah yang telah dikemukakan kemudian dianalisis dengan

menggunakan teknik skoring rata-rata dengan rumus sebagai berikut (Irianto, 2010):

$$\text{Skor Rata - rata} = \frac{\text{Total Nilai}}{\text{Jumlah Item}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan ini, ditentukan tabel skala kualifikasi sebagai berikut:

Tabel 2
Skala Kualifikasi

Rentang Skor	Variabel/Kualifikasi		
	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	Efektifitas Perencanaan Partisipatif
0,00 – 1,80	Tidak Berpartisipasi	Tidak Sesuai	Tidak Efektif
1,81 – 2,60	Kurang Berpartisipasi	Kurang Sesuai	Kurang Efektif
2,61 – 3,40	Cukup Berpartisipasi	Cukup Sesuai	Cukup Efektif
3,41 – 4,20	Berpartisipasi	Sesuai	Efektif
4,21 – 5,00	Sangat Berpartisipasi	Sangat Sesuai	Sangat Efektif

(Sumber: Irianto, 2010)

Analisis Data Hasil Wawancara dan Dokumentasi

Hasil wawancara dan dokumentasi digunakan untuk menunjang kuesioner atas semua rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk menganalisis data yang bersumber dari wawancara digunakan teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992: 17). Langkah-langkah analisis dalam model ini terdiri atas 4 tahapan yang saling berkaitan yaitu (a) pengumpulan data, (b) reduksi data, (c)

penyajian data serta (d) penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Karakteristik Responden

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 81 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik *area sampling* dan *purposive sampling*. Berdasarkan kuesioner yang dikembalikan responden diketahui karakteristik responden seperti terlihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	- Laki-laki	77 orang 95,06%
	- Perempuan	4 orang 4,94%
	Jumlah	81 orang 100,00%
Umur	- 20 - 30 tahun	17 orang 20,99%
	- 31 - 40 tahun	32 orang 39,51%
	- 41 - 50 tahun	24 orang 29,63%
	- 51 - 60 tahun	5 orang 6,17%
	- > 61 tahun	3 orang 3,70%
	Jumlah	81 orang 100,00%
Pekerjaan	- Tani	50 orang 61,73%
	- PNS	9 orang 11,11%

Tingkat Pendidikan	- Wiraswasta	15 orang	18,52%
	- Pegawai Swasta	7 orang	8,64%
	Jumlah	81 orang	100,00%
	- SMP sederajat	2 orang	2,47%
	- SMA sederajat	60 orang	74,07%
	- Strata Satu (S1)	17 orang	20,99%
	- Strata Dua (S2)	2 orang	2,47%
	Jumlah	81 orang	100,00%

(Sumber: Hasil Kuesioner, data diolah 2016)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa responden jenis kelamin laki-laki mendominasi jumlah sampel. Dari catatan lapangan diketahui bahwa dominannya jumlah responden laki-laki karena sebagian besar responden dengan kriteria yang ditetapkan dalam penentuan sampel memang banyak didominasi oleh laki-laki seperti laki-laki lebih banyak terlibat dalam musrenbang desa, keterlibatan mereka dalam pengelolaan atau pelaksanaan pembangunan desa dan keterlibatan mereka dalam keorganisasian desa. Responden perempuan adalah mereka yang hanya terlibat dalam organisasi PKK dan Posyandu.

Umur responden antara 31 - 40 tahun mendominasi jumlah responden karena dari catatan lapangan yang didasarkan pada informasi ditemukan kelompok umur ini paling banyak terlibat dalam kepengurusan organisasi yang ada di desa seperti karang taruna, BPD, LPM Desa dan kelompok sosial lainnya seperti remaja masjid, kelompok tani dan kader pembangunan desa. Kelompok umur 61 tahun adalah mereka yang menurut masyarakat dianggap sebagai tokoh desa atau tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat dan cendekiawan desa. Dengan adanya tingkatan umur yang variatif ini diharapkan mereka dapat memberikan tanggapan yang obyektif atas responden yang diberikan.

Berdasarkan pada Tabel 3 juga dapat dijelaskan bahwa jumlah responden dengan pekerjaan petani mendominasi jumlah responden. Dominasi ini wajar karena 3 kecamatan lokasi penelitian secara geografis adalah wilayah pertanian dan perkebunan dan ini berdampak pada kondisi sosial masyarakat dimana sebagian besar dari penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai petani. Menurut catatan lapangan yang didasarkan pada informasi menunjukkan bahwa jumlah responden yang berstatus wiraswasta adalah mereka yang umumnya memiliki usaha perdagangan dan kelompok ini juga merupakan jumlah terbesar kedua setelah petani. Dari data yang ada, tiga kecamatan lokasi penelitian sudah memiliki pasar tradisional harian, sehingga ini juga mempengaruhi status mata pencaharian warga di lokasi penelitian.

Jumlah responden dengan pendidikan SMA sederajat mendominasi jumlah responden. Dari data yang ada ditemukan bahwa 3 kecamatan lokasi

penelitian sudah memiliki sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta. Khususnya daerah Kecamatan Tugumulyo sudah memiliki 1 buah SMA Negeri, 1 buah SMK, 1 buah MA swasta dan 1 buah SMA swasta. Dampak dari sarana ini adalah rata-rata tingkat pendidikan di 3 kecamatan adalah SMA/MA sederajat. Responden dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) merupakan jumlah responden terbesar kedua. Dari hasil kuesioner ditemukan responden dengan tingkat pendidikan S1 sebagian besar adalah PNS dan wiraswasta. Dengan rata-rata tingkat pendidikan yang sudah baik ini diharapkan responden dapat memberikan tanggapan yang obyektif terhadap kuesioner yang diberikan.

Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Musi Rawas

Hasil hitung atas jawaban responden pada variabel partisipasi masyarakat memperoleh skor rata-rata sebesar 3,00 dan hasil ini masuk dalam kualifikasi "Cukup Berpartisipasi". Cukup berpartisipasi artinya masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil ini tentu saja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu membuat upaya-upaya bagaimana agar partisipasi masyarakat lebih maksimal dalam perencanaan pembangunan. Yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah peran atau partisipasi masyarakat sebagai pihak yang ikut menentukan perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan pada hasil analisis atas tanggapan responden yang menunjukkan bahwa masyarakat "kurang berpartisipasi" dalam perannya sebagai pengambil keputusan. Skor rata-rata yang diperoleh hanya mencapai 2,49 dan hasil ini menunjukkan bahwa di dalam musyawarah desa, masyarakat kurang memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan tentang rencana pembangunan infrastruktur desa.

Munculnya tanggapan responden yang menyimpulkan bahwa masyarakat kurang memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan tentang rencana pembangunan infrastruktur desa mendapat tanggapan berbeda dari beberapa informan yaitu (a)

keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa usulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tidak dapat direalisasikan dan (b) adanya ketidaksinkronan antara program atau kegiatan yang disusun oleh SKPD dengan usulan yang dibuat oleh pemerintah desa (lihat hasil wawancara pada lampiran 2). Dampaknya adalah masyarakat memiliki anggapan bahwa apa yang mereka usulkan dan putuskan dalam penetapan prioritas pembangunan tidak berguna dan akhirnya pada kuesioner mereka menyatakan tidak memiliki kekuatan untuk ikut menentukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa.

Berdasarkan hasil hitung atas jawaban responden dan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, masyarakat cukup berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa di Kabupaten Musi Rawas. Masyarakat kurang menjadi penentu atas penetapan rencana pembangunan infrastruktur desa, tetapi menurut para informan tidak sepenuhnya apa yang dinyatakan oleh responden adalah benar. Informan memberikan alasan bahwa keterbatasan anggaran dan masalah pemerataan anggaran serta beberapa usulan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam rencana kerja SKPD yang menyebabkan seolah-olah masyarakat tidak memiliki *bargaining position* dalam menentukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa.

Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa dengan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas

Hasil analisis data dari jawaban responden menunjukkan bahwa secara keseluruhan perencanaan pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas cukup sesuai dengan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan. Rata-rata skor yang diperoleh sebesar 2,74 dan berdasarkan rentang kualifikasi skor yang telah ditentukan, hasil ini masuk dalam kualifikasi "Cukup Sesuai". Cukup sesuai berarti belum memenuhi kriteria atau masuk dalam kualifikasi "sesuai" dan "sangat sesuai", sehingga Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu memperhatikan permasalahan ini khususnya dalam hal penentuan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam perencanaan pembangunan. Dari hasil analisis tanggapan responden ditemukan indikator prioritas pembangunan memperoleh skor terendah yaitu 2,43, artinya penetapan prioritas pembangunan infrastruktur desa kurang sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Hasil ini menunjukkan bahwa (a) prioritas pembangunan infrastruktur desa kurang memperhatikan visi dan misi yang ditetapkan oleh pemerintah desa, (b) prioritas pembangunan infrastruktur desa kurang berorientasi pada tujuan

pemenuhan hajat hidup masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya, (c) prioritas pembangunan infrastruktur desa kurang mengutamakan sektor unggulan yang ada di desa dan (d) prioritas pembangunan infrastruktur desa kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi desa dan masih menimbulkan beberapa reaksi negatif dari masyarakat.

Simpulan hasil analisis atas jawaban responden tersebut juga disetujui oleh para informan penelitian. Dari hasil analisis atas wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa (a) masalah yang muncul adalah rendahnya kualitas SDM pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan, (b) minimnya anggaran yang diterima desa menyulitkan mereka dalam mengalokasikan anggaran, (c) salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat atau menyusun usulan lain di luar anggaran yang mereka terima, tetapi SKPD sudah memiliki skala prioritas wilayah mana yang harus menerima program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan (d) buku Pedoman Perencanaan Pembangunan belum maksimal disosialisasikan sampai pada tingkat desa, buku pedoman hanya disosialisasikan hanya sampai pada tingkat SKPD (hasil wawancara lengkap lihat lampiran 2).

Berdasarkan hasil hitung dan hasil analisis atas wawancara tersebut maka pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, implementasi penyusunan rencana pembangunan oleh pemerintah desa cukup sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Kedua, belum tercapainya kesesuaian tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa mulai dari perumusan Visi dan Misi, analisis kebijakan pembangunan, strategi pembangunan, analisis prioritas sampai pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.

Berkaitan dengan skala prioritas juga ditemukan beberapa kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara. Menurut Metrosiantar (2014) ditemukan banyak pembangunan infrastruktur tidak tepat sasaran dan terkesan mubazir. Disebutkan juga bahwa Pemkab Madina belum benar-benar membuat studi kelayakan atau skala prioritas dalam melaksanakan program pembangunan agar program tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Ketidaksinkronan antara anggaran dengan sistem *bottom up* dan *top down budgeting* seringkali menimbulkan permasalahan dalam hal pemerataan pembangunan dan pemenuhan skala prioritas pembangunan di desa. Sebagai contoh hasil penelitian oleh Alim (2008) yang salah satu hasil penelitian menjelaskan bahwa penyusunan anggaran

pembangunan nasional bersifat *top down* dan *bottom up budgeting*. Istilah pertama mengacu pada penganggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan istilah kedua penganggaran yang berasal dari pemerintah daerah yang usulannya dilakukan dengan didasarkan pada hasil musrenbang. Penganggaran pemerintah pusat diwujudkan dalam program nasional yang menjadi acuan pembangunan semua daerah, ketika prioritas pembangunan daerah diusulkan ke pemerintah pusat tetapi tidak termaktub dalam kebijakan program, maka prioritas dimungkinkan tidak akan dilakukan. Ini menjadi dilema pemerintah pusat, di satu sisi prioritas tidak sesuai dengan kebijakan program, di sisi lain prioritas adalah usulan masyarakat. Fenomena ini juga muncul di Kabupaten Musi Rawas karena menurut para informan untuk mengatasi program yang tidak dapat direalisasikan dalam perencanaan pembangunan, pemerintah desa membuat usulan lain di luar anggaran rutin yang mereka terima, tetapi SKPD sudah memiliki skala prioritas wilayah mana yang harus menerima program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD (lihat hasil wawancara pada lampiran 2).

Efektivitas Anggaran Pembangunan Partisipatif Infrastruktur Desa di Kabupaten Musi Rawas

Hasil hitung atas jawaban responden menunjukkan bahwa anggaran pembangunan partisipatif infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas cukup efektif karena nilai rata-rata yang diperoleh mencapai 2,95 dan menurut rentang kualifikasi skor yang telah ditentukan masuk dalam kualifikasi "cukup efektif". Efektif dalam penelitian ini didasarkan pada sejauh mana sebuah pembangunan infrastruktur memberikan dampak (*outcome*) dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, terutama masyarakat desa. Dengan hasil cukup efektif berarti anggaran partisipatif belum mencapai kriteria atau kualifikasi efektif.

Masalah utama berkaitan dengan efektivitas anggaran partisipatif adalah anggaran partisipatif dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Hasil analisis terhadap tanggapan responden ditemukan indikator ini memperoleh skor terkecil yaitu 2,79. Dengan hasil ini, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Musi Rawas adalah hasil pembangunan Kabupaten Musi Rawas semaksimal mungkin disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Jika hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat maka masyarakat dapat memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat.

Hasil wawancara kepada informan juga menunjukkan mereka setuju terhadap simpulan hasil hitung kuesioner bahwa anggaran partisipatif dalam pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas cukup efektif. Hasil analisis atas

wawancara memberikan deskripsi bahwa infrastruktur sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian masyarakat. Diharapkan SKPD dan pemerintah desa lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Dari data yang diperoleh pada BPS Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa luas lahan yang dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Musi Rawas mencapai 357.001,05 ha (28,87%) dari luas lahan 1.236.582,66 ha. Faktor ini merupakan faktor perhitungan utama bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas memiliki sektor unggulan bidang pertanian dan perkebunan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Kecamatan Tugumulyo, Purwodadi dan sebagian Kecamatan Megang Sakti dan Sumber Harta mengandalkan sektor pertanian sawah dan perikanan. Kemudian kecamatan Muara Beliti, TPK, Jaya Loka, dan Suka Karya mengandalkan sektor perkebunan karet dan kerajinan tradisional, Kecamatan Muara Lakitan, BTS Ulu, Muara Kelingi dan Tuah Negeri mengandalkan sektor perkebunan sawit dan sebagian perkebunan karet.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil analisis data, baik yang bersumber dari kuesioner dan wawancara, menunjukkan adanya permasalahan yang muncul pada masing-masing variabel penelitian. Berikut adalah implikasi hasil penelitian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut:

1. Pada variabel partisipasi masyarakat, berdasarkan hasil analisis kuesioner khususnya item nomor 9, menunjukkan adanya anggapan dari responden bahwa masyarakat tidak memiliki *bargaining position* dalam menentukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa atau masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk ikut menentukan prioritas pembangunan infrastruktur desa. Sementara, hasil wawancara kepada informan menunjukkan bahwa tanggapan responden tidak sepenuhnya adalah benar. Menurut para informan, tidak terpenuhinya realisasi prioritas yang ditetapkan dalam RKP lebih dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, masalah pemerataan anggaran dan karena beberapa usulan yang dibuat oleh pemerintah desa tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam rencana kerja SKPD. Mencermati masalah tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu (a) pemerintah desa harus benar-benar terbuka kepada masyarakat tentang kemampuan anggaran yang dimiliki setiap tahunnya untuk keperluan pembangunan infrastruktur desa. Dengan mengetahui besaran kemampuan

anggaran, masyarakat akan mengerti bahwa tidak semua usulan prioritas dapat dipenuhi. Dengan keterbukaan ini, tidak akan memunculkan anggapan negatif masyarakat tentang pelaksanaan musrenbang, masyarakat tidak akan lagi memiliki pandangan bahwa musrenbang bukanlah kegiatan formalitas saja demi cairnya anggaran desa. Harapan terakhirnya adalah, masyarakat tidak hilang kepercayaannya kepada kegiatan musrenbang sebagai wadah dimana masyarakat dapat ikut menentukan penetapan prioritas pembangunan infrastruktur desa dan (b) hasil musrenbang jangan hanya menjadi dokumen syarat pencairan dana, masyarakat juga perlu mengerti apa yang tertuang dalam RKP sebagai keputusan akhir musrenbang. Munculnya anggapan negatif masyarakat karena mereka tidak mengetahui apakah prioritas yang mereka usulkan benar-benar tertuang dalam RKP dan diusulkan kepada *stake holder*. Hasil musrenbang bisa saja berbeda ketika dituangkan dalam RKP karena adanya keterbatasan anggaran, tetapi masyarakat perlu mengerti mengapa hal itu terjadi. Melakukan musyawarah lanjutan hasil musrenbang guna penetapan final RKP sangat memungkinkan untuk memecahkan permasalahan ini.

2. pada variabel implementasi penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur desa, berdasarkan tanggapan responden, ditemukan dua permasalahan yaitu (a) penetapan prioritas pembangunan infrastruktur desa kurang sesuai dengan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan (b) penetapan sasaran dan target dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa “kurang sesuai” dengan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Menurut hasil analisis jawaban informan, salah satu penyebab munculnya dua permasalahan tersebut adalah rendahnya kompetensi aparatur atau SDM pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan. Permasalahan masih lemahnya kemampuan aparatur atau SDM pemerintah desa, tentu saja berkaitan dengan pendidikan dan untuk itu beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah (a) pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, harus lebih banyak memberikan kesempatan kepada aparatur desa untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop dan studi banding yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan pembangunan. Jika masih saja tidak mengalami perubahan yang signifikan, ada baiknya kepala desa melakukan kajian untuk melakukan rekrutmen ulang para aparatur desa yang memang benar-benar sudah tidak mampu lagi, (b) kepala desa dapat memanfaatkan Kader Pembangunan Masyarakat Desa (KPM) yang sudah mendapat

banyak pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan dalam program PNPM untuk dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, (c) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam hal ini Bappeda, harus lebih luas dalam melakukan sosialisasi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan, dan (d) akan lebih baik jika Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga menyusun dan mendistribusikan Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan yang lebih *simple* keseluruh tingkat desa dengan susunan dan bahasa yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

3. Meskipun variabel efektivitas anggaran partisipatif dalam pembangunan, berdasarkan hasil analisis tanggapan responden, telah menunjukkan hasil yang cukup efektif, tetapi masih memunculkan permasalahan yaitu perencanaan partisipatif belum sepenuhnya mendukung adanya optimalisasi partisipasi masyarakat. Salah satu tolok ukur dari perencanaan partisipatif yang baik atau efektif menurut Pedoman Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah perencanaan yang dibuat (a) menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan (b) hasil pembangunan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat. Langkah yang dapat ditempuh agar perencanaan partisipatif dapat mendukung optimalisasi partisipasi masyarakat yaitu (a) pemerintah desa benar-benar melakukan analisis kebutuhan nyata masyarakat akan jenis infrastruktur desa. Untuk melakukan analisis ini, tidak membutuhkan waktu yang sedikit, perlu adanya proses penggalan informasi langsung dari masyarakat. Akan lebih baik jika pemerintah desa terjun langsung menanyakan kepada masyarakat tentang permasalahan-permasalahan infrastruktur desa. Penggalan informasi melalui jalur non formal, sepertinya lebih baik, karena masyarakat akan lebih terbuka menyampaikan aspirasinya, (b) memaksimalkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Selama ini banyak isu atau berita tentang seringnya terjadi pertentangan antar lembaga yang ada di masyarakat, seperti antara kepala desa dengan BPD karena masalah anggaran pembangunan. Kondisi ini menciptakan adanya ketidakberlangsungan komunikasi antar lembaga penting di desa. Lebih banyak melibatkan lembaga kemasyarakatan di desa akan memberikan banyak *feedback* atas hasil pembangunan di desa dan (c) lebih banyak merangkul tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang paling didengar suaranya oleh masyarakat. Dengan melibatkan orang-orang ini diharapkan mampu menetralkan permasalahan atau pertentangan yang muncul dalam masyarakat. Selain itu, biasanya masyarakat

juga lebih terbuka dalam bicara kepada tokoh masyarakat. Masyarakat berkeluh kesah dan menyampaikan ketidakpuasan atas sesuatu di desa juga biasanya disampaikan kepada tokoh masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat cukup berpartisipasi dalam penyusunan anggaran pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas. Permasalahan yang muncul dalam partisipasi masyarakat adalah adanya anggapan dari responden bahwa masyarakat tidak memiliki *bargaining position* dalam menentukan anggaran pembangunan infrastruktur desa atau masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk ikut menentukan prioritas pembangunan infrastruktur desa.
2. Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur desa cukup sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Permasalahan yang muncul adalah penetapan prioritas, sasaran dan target pembangunan infrastruktur desa kurang sesuai dengan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Salah satu penyebab munculnya permasalahan tersebut adalah rendahnya kompetensi aparatur atau SDM pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan.
3. Perencanaan pembangunan partisipatif infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas cukup efektif. Permasalahan utama yang muncul yaitu pelaksanaan dan hasil pembangunan infrastruktur desa di Kabupaten Musi Rawas kurang mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Saran

1. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam anggaran pembangunan dapat dilakukan dengan cara melakukan sinkronisasi antara program atau kegiatan yang ditetapkan oleh SKPD dengan program atau kegiatan yang diinformasikan oleh masyarakat yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa dapat mengundang aparatur SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada di kecamatan untuk ikut hadir dalam musrenbang desa.
2. Untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa agar sesuai dengan pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas, dapat dilakukan dengan cara memberikan pendidikan, pelatihan dan kegiatan

pengembangan SDM pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pembangunan. Karena masalah utama dari kurang sesuai implementasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan adalah rendahnya kemampuan SDM atau aparatur pemerintahan desa. Selain dari pada itu, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga menyusun dan mendistribusikan Buku Pedoman Perencanaan Pembangunan yang lebih *simple* keseluruh desa di Kabupaten Musi Rawas dengan susunan dan bahasa yang lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

3. Untuk meningkatkan efektivitas perencanaan partisipatif dapat dilakukan dengan cara lebih banyak menerima masukan dari masyarakat tidak hanya sebatas pada saat musrenbang dilakukan. Pemerintah desa dapat membuka kotak pengaduan dan saran di kantor desa, karena pada dasarnya masih ada masyarakat yang tidak sempat atau tidak memiliki kesempatan untuk hadir pada musrenbang. Dengan cara ini, sepertinya masyarakat akan lebih leluasa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R.N dan Govindarajan, 2005. Management Control Systems, Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Arikunto, Suharismi. 2004. Manajemen Penelitian. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewanto, Haryo, 2004, Analisis Pengaruh Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Residual Income, dan Cash Flow Operation terhadap Imbal Hasil Saham Sektor Pertambangan di Bursa Efek Jakarta periode 1995 – 2004, *Tesis*, Universitas Indonesia, Depok.
- Hansen, D.R dan Maryane M. Mowen, 2004. Management Accounting, Edisi Indonesia. Jakarta: Erlangga
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2091570/sby>
pembangunan infrastruktur masih jauh dari sempurna (diakses tanggal 10 September 2016).
- <http://www.merdeka.com/uang/pembangunan>
infrastruktur di indonesia tidak efisien.html (diakses tanggal 10 September 2016).
- <http://www.metrosiantar.com/topik/2014/01/31/121175/tahun2014> program pembangunan harus tepat sasaran (diakses tanggal 10 September 2016).
- <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah/2014/03/05/3303> (diakses tanggal 10 September 2016).

- Irianto, Agus, 2010. *Statistika Konsep, Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Komaruddin, 1994, *Esiklopedia Manajemen*, Edisi Kesatu. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Nizarul Alim. 2008. Efektivitas Perpaduan dan Komponen Anggaran dalam Prosedur Anggaran: Pengujian Kontinjensi Matching. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 10 No.2 :69-76.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, Matthew B, and Huberman, A.Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Rohidi. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2012. Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, 2014. *Pedoman Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas*. Muara Beliti: Bappeda Kabupaten Musi Rawas.
- Rusmadi, dkk, 2006-a, *Membangun Perencanaan Partisipatif di Desa*, Samarinda: CForce.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Theresia, Aprillia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: Bappenas.
- Zimmerman, Jerold L, 1995. *Accounting For Decision Making and Control*, Chicago: Richard D. Irwin.

Lampiran 1: Hasil Analisis Tanggapan Responden tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Indikator	No	Pertanyaan	ALTERNATIF JAWABAN												Rata-rata Indikator	
			Sangat Setuju		Setuju		Netral		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Total Skor	Rata-rata		
			Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor				
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Sebagai pemberi informasi	1	Saudara memberikan informasi tentang kondisi nyata di wilayah saudara dalam rangka pembangunan infrastruktur desa	0	0	74	296	7	21	0	0	0	0	0	0	317	3,91
	2	Saudara memberikan informasi tentang jenis infra struktur desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan saudara	0	0	75	300	6	18	0	0	0	0	0	0	318	3,93
	3	Peserta musyawarah perencanaan pembangunan sudah mewakili masyarakat di wilayah desa Saudara.	0	0	19	76	56	168	6	12	0	0	0	0	256	3,16
Sebagai tempat konsultasi	4	Pemerintah Kabupaten Masi Rawas melalui pemerintah desa melalukan dengar pendapat kepada masyarakat sebelum menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur desa secara informal (secara tidak resmi).	0	0	9	36	49	147	23	46	0	0	0	0	229	2,83
	5	Tokoh masyarakat di desa Saudara dimanfaatkan untuk tempat konsultasi pemerintah desa sebelum perencanaan pembangunan infrastruktur desa disusun.	0	0	6	24	44	132	31	62	0	0	0	0	218	2,69
	6	Pemerintah desa memanfaatkan lembaga kemasyarakatan desa sebagai tempat berkonsultasi sebelum penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan.	0	0	6	24	72	216	3	6	0	0	0	0	246	3,04
Sebagai pengambil keputusan	7	Saudara terlibat dalam rapat musyawarah pembangunan desa guna penetapan rencana kerja pembangunan desa, khususnya pembangunan infrastruktur desa.	0	0	7	28	37	111	37	74	0	0	0	0	213	2,63
	8	Saudara memberikan saran dalam musyawarah rencana pembangunan desa tentang jenis dan jumlah infrastruktur desa yang harus dibangun di desa saudara.	0	0	11	44	22	66	48	96	0	0	0	0	206	2,54
	9	Di dalam musyawarah desa, Saudara ikut menentukan keputusan tentang rencana pembangunan infrastruktur desa.	0	0	0	0	23	69	58	116	0	0	0	0	185	2,28
											Jumlah	2.188				
											Rata-rata Variabel		3,00			

(Sumber: Hasil Kuesioner, data diolah 2016)

Lampiran 2: Tanggapan Responden tentang Implementasi Penyusunan Perencanaan

Indikator	No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban												Rata-rata Indikator
			Sangat Setuju		Setuju		Netral		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Total Skor	Rata-rata	
			Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor			
Kondisi Umum Desa	10	Perencanaan pembangunan infrastruktur di desa sudah memperhatikan aspek posisi daerah, tata ruang lahan, dan sistem jaringan jalan.	0	0	0	30	90	51	102	0	0	0	192	2,37	
	11	Perencanaan pembangunan infrastruktur di desa sudah memperhatikan aspek potensi sumber daya alam.	0	0	2	8	56	168	23	46	0	0	222	2,74	
	12	Perencanaan pembangunan infrastruktur di desa sudah memperhatikan aspek nilai-nilai yang berkembang di masyarakat seperti agama, budaya, adat dan nilai kesustrawajana lainnya.	0	0	28	112	50	150	3	6	0	0	268	3,31	
	13	Perencanaan pembangunan infrastruktur di desa sudah memperhatikan keterlibatan pembaharu dalam proses pelaksanaannya.	0	0	4	16	62	186	15	30	0	0	232	2,86	
Visi dan Misi	14	Visi pemerintah desa sudah memuat kebutuhan pokok masyarakat dan dirumuskan secara kolektif, jelas serta dapat diwujudkan dalam kenyataannya.	0	0	0	0	77	231	4	8	0	0	239	2,95	
	15	Visi pemerintah desa sudah dapat dirumuskan dan disertai indikator-indikator yang kolektif dan dapat dicapai.	0	0	0	0	80	240	1	2	0	0	242	2,99	
	16	Misi pemerintah desa sudah berorientasi dengan rumusan visi yang ditetapkan.	0	0	22	88	57	171	2	4	0	0	263	3,25	
	17	Misi pemerintah desa sudah memperhatikan kendala dan permasalahan di masa lalu dan saat ini-saat ini yang ingin dicapai di masa yang akan datang.	0	0	16	64	62	186	3	6	0	0	256	3,16	
Prioritas Pembangunan	18	Prioritas pembangunan infrastruktur di desa sudah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.	0	0	0	0	36	108	45	90	0	0	198	2,44	
	19	Prioritas pembangunan infrastruktur di desa sudah memperhatikan pada tujuan pembangunan jangka panjang masyarakat seperti pemerataan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lainnya.	0	0	1	4	30	90	50	100	0	0	194	2,40	
	20	Prioritas pembangunan infrastruktur di desa sudah memperhatikan sektor unggulan yang ada di desa.	0	0	1	4	31	93	49	98	0	0	195	2,43	
	21	Prioritas pembangunan infrastruktur di desa sudah memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi desa dan tidak menimbulkan risiko negatif dari masyarakat.	0	0	1	4	37	111	43	86	0	0	201	2,48	
Strategi Pembangunan	22	Strategi pembangunan infrastruktur di desa sudah didasarkan pada kondisi, potensi yang dimiliki dan masalah pokok yang dihadapi.	0	0	4	16	57	171	20	40	0	0	227	2,80	
	23	Strategi pembangunan infrastruktur di desa sudah berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya tersedia.	0	0	4	16	63	189	14	28	0	0	233	2,88	
	24	Strategi pembangunan infrastruktur di desa sudah didasarkan pada kendala yang dihadapi pada masa lalu dan dapat diwujudkan dengan perubahan di masa yang akan datang.	0	0	1	4	65	195	15	30	0	0	229	2,83	

Lanjutan lampiran 2:

Indikator	No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban												Rata-rata Indikator
			Sangat Setuju		Setuju		Netral		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Total Skor	Rata-rata	
			Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor	Frek	Skor			
Kebijakan Pembangunan	25	Kebijakan pembangunan infrastruktur di desa sudah sudah mendorong dan mendukung ketercapaian tujuan pembangunan kabupaten Muli Rawas	0	0	4	16	74	222	3	6	0	0	244	3.01	3.03
	26	Perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur di desa sudah mengacu dan memperhatikan visi dan misi, kondisi dan potensi daerah, permasalahan pokok pembangunan, dan proyeksi pembangunan ke depan.	0	0	5	20	75	225	1	2	0	0	247	3.05	
Sasaran dan Target	27	Kebijakan pembangunan infrastruktur di desa sudah tidak memihak pada kepentingan satu golongan dan individu tertentu.	0	0	4	16	75	225	2	4	0	0	245	3.02	2.47
	28	Penetapan sasaran dan target pembangunan infrastruktur di desa sudah sudah konkret, dapat diukur pelaksanaan dan ketercapaiannya.	0	0	0	0	38	114	43	86	0	0	200	2.47	
Sasaran dan Target	29	Penetapan target dan sasaran pembangunan infrastruktur di desa sudah sudah mengaitkan prediksi masa datang yang didasarkan pada tren (forecasting) yang terjadi di masa lalu dengan memperhatikan data dan fakta yang tersedia.	0	0	1	4	33	99	47	94	0	0	197	2.43	2.47
	30	Sasaran dan target pembangunan infrastruktur di desa sudah sudah berbantuan dengan aspek pertumbuhan ekonomi, kemandirian rakyat, kemampuan tenaga kerja, kemandirian dan distribusi, penyediaan lapangan kerja dan pengangguran serta kebutuhan peningkatan pendapatan asli desa.	0	0	1	4	34	102	46	92	0	0	198	2.44	
	31	Sasaran dan target pembangunan infrastruktur di desa sudah sudah betorientasi pada kemajuan yang akan dicapai pada masing-masing sektor yang telah ditentukan.	0	0	1	4	40	120	40	80	0	0	204	2.52	
											Jumlah	4.916			
											Rata-rata Variabel	2.76			

(Sumber: Hasil Kuesioner, data diolah 2016)